

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Sumber Daya Laut (SDL) Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Imadoedin¹, Syaiful², Rini Aristin³, Syaiful Anam⁴, Anisa Fajriana Oktasari⁵

¹Universitas Madura, Jawa Timur, Indonesia
^{2,3,4,5}Universitas Madura, Jawa Timur, Indonesia
imadoedin@unira.ac.id

Abstrak: Amanah Undang-Undang Nomor 27 tentang pengelolaan wilayah pesisir merupakan representasi pemerintah untuk masyarakat pesisir guna pengembangan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber daya manusia (SDA dan SDM). Melalui potensi lautnya yang sangat besar, semestinya memberikan harapan dan peluang, terutama masyarakat pesisir menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan kekayaan kelautan yang demikian besar, rasanya tidak percaya jika ternyata belum mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Kriteria miskin tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat pendidikan yang layak. *Dalam rangka mewujudkan masyarakat pesisir sejahtera maka diperlukan kreatifitas serta inovasi guna mendorong dan menjaga ketahanan pangan sehingga memberikan solusi yang efektif guna pengentasan kemiskinan di desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.*

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; SDA dan SDM, Perekonomian Masyarakat

Abstract: *The mandate of Law Number 27 concerning the management of coastal areas is the government's representation for coastal communities to develop the potential of Natural Resources and Human Resources (NR and HR). Through its enormous marine potential, it should provide hope and opportunity, especially for coastal communities to become prosperous communities. So with such a large marine wealth, it seems unbelievable that it has not been able to prosper the lives of the fishing community. Most Indonesian fishermen still live within the poverty line. The poor criteria are shown by the low income of fishermen, so that they still experience difficulties in meeting their basic needs for food, clothing, health, housing and a decent level of education. In order to realize a prosperous coastal community, creativity and innovation are needed to encourage and maintain food security so as to provide effective solutions for poverty alleviation in the village of Branta Pesisir, Tlanakan District, Pamekasan Regency.*

Keywords: *Coastal Community Empowerment, Natural Resources and Human Resources, Community Economy*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebagai salah satu negara kepulauan atau negara maritim, memiliki potensi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang berlimpah berlimpah untuk dikembangkan secara optimal dan profesional sehingga bisa memberi dampak yang signifikan bagi negara dan bangsa. Berdasarkan Undang- Undang No.1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.27 tentang pengelolaan wilayah pesisir pasal 63 yang berbunyi "pemerintahan dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya pemerintah dan pemerintahan daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir melalui peningkatan usaha

masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar dan aset ekonomi produktif lainnya”.

Amanah UU di atas representasi pemerintah untuk masyarakat pesisir guna pengembangan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber daya manusia (SDA dan SDM)(Rahmiyati, 2018). Melalui potensi lautnya yang sangat besar, semestinya memberikan harapan dan peluang, terutama masyarakat pesisir menjadi masyarakat yang sejahtera. Sehingga dengan kekayaan kelautan yang demikian besar, rasanya tidak percaya jika ternyata belum mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan. Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan. Kriteria miskin tersebut diperlihatkan dengan rendahnya pendapatan nelayan, sehingga mereka masih mengalami kesulitan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan tingkat pendidikan yang layak.

Masalah kemiskinan masyarakat pesisir merupakan masalah yang bersifat multidimensi karena cukup beragam sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Untuk menyelesaikannya harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat nelayan, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Keberadaan masyarakat nelayan sangat dibutuhkan oleh segala sektor karena ikan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang setiap saat diperlukan. Perlu penanganan serius dari pemerintah daerah untuk memberdayakan agar mereka dapat hidup layak serta kesehatan mereka dapat terjamin.

Potensi sumber daya laut (SDL) merupakan sumber kekuatan utama dalam peningkatan perekonomian masyarakat pesisir(Syarief et al., 2022). Akan tetapi penggunaannya harus didukung oleh SDM yang kompeten sehingga menghasilkan output dan outcome yang berkelanjutan dan tanpa merusak ekosistem laut. Potensi bidang kelautan cukup besar meliputi sektor perikanan, pelayaran, pariwisata bahari, perkapalan, jasa pelabuhan serta sumberdaya mineral bawah laut. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi kelautan akan tetapi diperlukan keterpaduan kebijakan publik di bidang kelautan. Karena sektor kelautan menjadi potensi yang sangat strategis untuk didorong sebagai mainstream pembangunan perekonomian nasional.

Kekayaan sumberdaya pesisir dikuasai oleh Negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Ironisnya, sebagian besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir justru menempati strata ekonomi yang paling rendah bila dibandingkan dengan masyarakat darat lainnya. Dengan upaya peningkatan SDM masyarakat pesisir (nelayan) maka perekonomian akan meningkat, sehingga ketahanan ekonomi akan semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitikberatkan pada tumbuh dan berkembangnya sektor usaha dan industri lokal, yang mempunyai basis produksi bertumpu pada sumberdaya lokal. Bentuk-bentuk usaha yang telah berkembang seperti kerajinan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri kecil, makanan olahan sehat, adalah sektor ekonomi strategis yang harusnya digarap Desa dan Kerjasama Desa dalam meningkatkan perekonomiannya.

Untuk mewujudkan perekonomian masyarakat pesisir diperlukan kegiatan-kegiatan yang produktif melalui pemanfaatan sumber daya alam, misalnya usaha menengah . Menurut Sweden (Saefulloh et al., 2019) dalam menyatakan pemahaman ekonomi pesisir memberikan kontribusi ekonomi penting dari ekosistem untuk perekonomian karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Pertama, ekosistem pesisir yang sangat produktif dan memberikan kontribusi sejumlah besar nilai ekonomi terhadap perekonomian pesisir.
- 2) Kedua, semua negara pada umumnya, dan ekonomi pesisir khususnya, memiliki sistem yang kompleks dari kepemilikan, pasar, organisasi produktif, dan pemerintah yang menentukan siapa yang menerima manfaat ekonomi dan yang membayar biaya produksi.

Sarana dan prasarana ekonomi di lingkungan masyarakat, baik di Ibu Kota Kabupaten maupun di Ibu Kota Kecamatan termasuk Ibu Kota Desa, mendukung dan mendorong perekonomian. Antara lain sarana dan prasarana infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan perekonomian baik dan lancar dengan fasilitas yang sudah memadai, komunikasi lancar dan merata. Kenyataan yang ada di Wilayah Pesisir kabupaten Pamekasan khusus Desa Branta Pesisir.

Menurut Mubyarto, 1997 dalam sufi (Hakim, 2009) mengembangkan aspek pemberdayaan dalam beberapa sektor: 1. Pembangunan infrastruktur dengan sistem dan pola padat karya sebagai pemicu penanggulangan kemiskinan telah berhasil memacu dana dukungan dari berbagai pihak. 2. Kegiatan ekonomi produktif meliputi bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, koperasi, industri dan perdagangan dengan cara bergilir. 3. Kegiatan sosial kemasyarakatan meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan bidang sosial budaya lainnya.

Berdasarkan observasi di desa Branta Pesisir menjalankan kegiatan diatas karena terdapat permasalahan yaitu sistem perekonomian yang tidak terstruktur, dan kesadaran

masyarakat terhadap lingkungan tergolong rendah, kreativitas dan inovasi produk perlu ditingkatkan dan Rendahnya dukungan dan partisipasi dari tokoh masyarakat dalam mendorong masyarakat pesisir guna tercapainya masyarakat sejahtera. Sehingga diperlukan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan menuju desa maju dan mandiri. Dari permasalahan tersebut, kami melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat Desa Branta Pesisir dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dengan kegiatan pengabdian guna mendukung peningkatan kualitas Sumber daya manusia yang berorientasi kemandirian masyarakat dalam mendukung terciptanya desa maju dan mandiri.

Metode

Guna mencapai tujuan dari pembinaan dan pendampingan ini, maka dilakukan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan pembinaan, melalui koordinasi dan implementasi kegiatan di lapangan. yaitu:

1. Koordinasi Internal

Tujuannya adalah mengintegrasikan dan menyatukan visi pembinaan dan pendampingan terhadap terhadap desa binaan sehingga tercapai kesepakatan bersama guna mencapai tujuan akhir yaitu kemandirian desa Branta Pesisir.

2. Koordinasi dengan tokoh-tokoh Desa

Tujuannya untuk meminta dukungan serta partisipasi aktif dari pihak pemerintahan Branta Pesisir, Tokoh Agama (Ulama Desa), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan masyarakat desa sebagai sasaran utama. supaya pembinaan dan pendampingan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan bisa berjalan lancar sesuai rencana serta pemanfaatan program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

3. Pelaksanaan Kegiatan

a. Sosialisasi program

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat Mengidentifikasi tim pembinaan dan pendampingan serta menggali potensi desa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi keaktifan tim serta melakukan perubahan paradigma masyarakat desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

b. Pelatihan dan pembinaan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pembekalan kepada masyarakat serta melakukan diskusi interaktif kepada mereka kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat di desa tersebut sehingga dicarikan solusinya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil yang dicapai dari program pembinaan dan pendampingan melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan sumber daya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan melalui tahapan kegiatan, terlihat bahwa masyarakat desa kurang proaktif, hal ini menjadi pemicu terhambatnya kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Dalam Membangun desa menuju kemandirian sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* ketika diterapkan akan menghimpun kekuatan lokal masyarakat dalam memajukan taraf hidupnya.

Orientasi pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pemanfaatan Sumber daya laut dalam peningkatan perekonomian masyarakat harapannya dapat memaksimalkan potensi lokal. Pemetaan potensi desa untuk kemudian menjadi sasaran program pengembangan dan peluang ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan inovasi dan kreativitas. Pemberian kesempatan yang seluas - luasnya tidak cukup hanya melalui *treatment* membuka akses permodalan, tapi juga akses produksi, akses distribusi dan akses pasar. Akses permodalan dibuka dan dikembangkan melalui pemberian kredit yang terjangkau dan fleksibel. Akses produksi dikembangkan melalui dorongan dan dukungan sektor industri lokal yang berbasis sumberdaya lokal. Dan, akses pasar dikembangkan melalui regulasi dan kebijakan yang memastikan terbentuk dan berkembangnya kondisi yang optimal dari perekonomian di pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitikberatkan pada tumbuh dan berkembangnya sektor usaha dan industri lokal, yang mempunyai basis produksi bertumpu pada sumberdaya lokal. Bentuk-bentuk usaha yang telah berkembang seperti kerajinan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri kecil, makanan olahan sehat adalah sektor ekonomi strategis yang harusnya digarap desa dan kerja sama desa (Rafael et al., 2018).

Kajian mengenai masalah-masalah sosial ekonomi dan sosial budaya dalam konteks pembangunan masyarakat hingga dewasa ini masih banyak dilakukan dalam bentuk kajian-kajian makro. Model kajian tersebut memang bermanfaat terutama untuk melihat secara cepat faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Hanya saja, penelitian-penelitian demikian sering tidak mampu melihat permasalahan secara holistik, di samping ukuran yang

digunakan untuk melihat dan menilai permasalahan-permasalahan yang muncul umumnya tidak menggunakan ukuran dari kebudayaan masyarakat yang dipelajari (Dwi & Kartika, 2021).

Konsep pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan secara umum akan dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal yang dapat menentukan tingkat keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pattiasina (Muzaifa et al., 2022). Untuk lebih mengarah kepada pemahaman permasalahan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, dalam kerangka peningkatan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat dibutuhkan kajian lanjut dalam bentuk yang lebih memusatkan perhatian kepada pemahaman atau pengertian (*understanding*) dengan menggunakan perspektif emik. Dalam perspektif emik, masyarakat tidak dijadikan objek tetapi justru dijadikan subjek. Artinya, mereka perlu dilibatkan untuk bersama-sama memahami permasalahan, menganalisis mengapa permasalahan itu muncul, dan alternatif-alternatif pemecahan apa saja yang bisa ditawarkan.

Membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam implementasi program tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan finansial terhadap rakyat miskin, tapi juga mendorong usaha ekonomi desa dalam arti luas. Penciptaan kegiatan-kegiatan yang membuka akses produksi, distribusi, dan pasar bagi rakyat desa dalam pengelolaan kolektif dan individu mesti berkembang dan berlanjut.

Kooperatif lintas elemen pemangku desa, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintahan sangat diperlukan guna tercapainya desa mandiri. Namun implementasi program kegiatan pembinaan dan pengabdian terdapat banyak rintangan dan hambatan, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan semua program, tidak berjalan secara maksimal. Hal ini bermula bahwa masyarakat kurang memahami konsep desa mandiri apalagi ketika penulis dan tim melakukan kegiatan turba pada masyarakat, sebagian menghindar karena isu atau informasi covid19 dianggap sebagai benalu oleh sebagian masyarakat dan pada akhirnya masyarakat memiliki sifat eksklusif. Walaupun kegiatan belum terlaksana secara maksimal namun kegiatan inti yang sudah terlaksana.

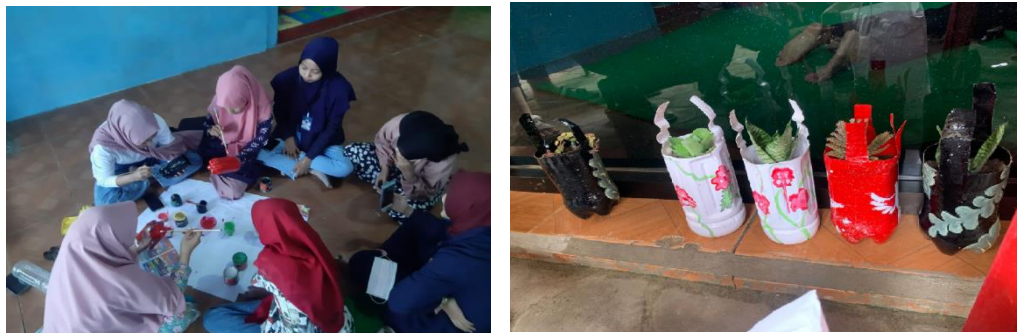
Berikut ini adalah foto-foto kegiatan yang telah dilaksanakan.



Gambar 1. Konsolidasi internal dalam perencanaan pendampingan dan pembinaan masyarakat pesisir



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial Bencana erupsi gunung semeru bersama masyarakat sekitar



Before

After

Gambar 3. Melakukan Kegiatan pembuatan batako dan pot bunga dari hasil Reduce sampah plastik



Before

After

Gambar 4. Melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) Desa Branta Pesisir



Gambar 5. Melakukan evaluasi kinerja Tim pengabdian masyarakat serta finishing program sekaligus penyerahan produk secara simbolis

Selanjutnya adalah hasil yang dicapai dari program pengabdian masyarakat dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan pada masyarakat Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan berdasarkan tahapan serta kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Diawali dengan melakukan Konsultasi dan Koordinasi ke

1. *Melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Upaya memperlancar proses dalam mempersiapkan kegiatan pembinaan dan pendampingan., kegiatan tambahan ini dianggap perlu dilakukan untuk mendapatkan respons, arahan atau petunjuk terkait pengabdian masyarakat itu sendiri, serta petunjuk teknis kegiatan secara menyeluruh. Kegiatan tersebut sangat membantu dalam melanjutkan tahapan kegiatan lainnya. Dengan melakukan koordinasi dengan para stakeholder antara tokoh- tokoh desa, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa beserta aparaturnya dan Tim guna mensinergikan persepsi dan keinginan bersama sehingga tujuan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lantemona et al. dalam edy et al (2021) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa camat dalam melaksanakan koordinasi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan harus mengupayakan dan memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam masyarakat sehingga bantuan yang disalurkan*

memenuhi target yang telah ditentukan.

2. Kegiatan bidang Reduce Sampah non-organik. adalah kegiatan akan pentingnya lingkungan bersih dan sehat di tengah merebaknya penyakit demam berdarah yang mempersempit ruang aktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada Kesehatan masyarakat. Maka hal tersebut harus dilakukan gerakan partisipatif semua elemen masyarakat dengan menjaga kesehatan individu maupun kolektif. Menurut Purnama (Maghfiroh, 2015) secara umum dampak limbah ditinjau segi dampak kesehatan dan lingkungan antara lain : a. kesehatan dapat menyebabkan atau menimbulkan penyakit diare dan tikus, penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengolahan yang tidak tepat, dan penyakit kulit misalnya kudis dan kurap, b. lingkungan : cairan dari limbah-limbah yang masuk ke sungai mencemarkan airnya sehingga mengandung virus-virus penyakit, berbagai ikan dapat mati dan bahkan punah.
3. Melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) Desa Branta Pesisir. Upaya peningkatan perekonomian masyarakat pesisir, diperlukan kegiatan ekonomi produktif dan inovatif sehingga dapat mempengaruhi taraf hidup masyarakat guna menekan laju jumlah pengangguran dan kemiskinan yaitu dengan megembangkan Potensi desa pesisir dengan melakukan kegiatan *home industry* melalui inovasi produk unggulan desa seperti pembuatan keripik kulit ikan, tanaman hias, batako dari sampah Hal ini, akan membantu memulihkan perekonomian masyarakat. Menurut Saebeni (2016) Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut : Sumber daya alam, Sumber daya manusia, Permodalan, Lapangan kerja, Keahlian atau kewirausahaan, Kestabilan politik, dan Kebijakan pemerintah. Pembangunan tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial. Fondasi moral kebijakan pembangunan ekonomi harus dapat memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat indonesia.
4. Melakukan kegiatan evaluasi kinerja Tim bersama seluruh stakeholder masyarakat Desa Branta Pesisir. Kegiatan pengabdian melalui kegiatan Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim pengabdian ini dilakukan guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi anggota tim dan masyarakat, sehingga saat melakukan kegiatan yang berkelanjutan dalam mensukseskan kemandirian desa serta inovasi baru yang disampaikan serta bisa mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan demi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurut mordianto (2008) Elemen-elemen masyarakat sebagai sistem, antara lain: (a). Tujuan/sasaran, perubahan yang diharapkan atau dikehendaki oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan terus-menerus operasinya. (b). Norma, aturan atau penuntun standar yang menentukan apa yang pantas atau tidak pantas dalam masyarakat. Norma berpengaruh terhadap arti aplikasi dalam hasil yang dicapai tujuan/sasaran masyarakat. (c). Status, peran, posisi dalam

struktur dan dimulai dengan tingkah laku dan penampilan individu atau individu individu dalam masyarakat. Mereka menggabungkan struktur dan fungsi. (d). Sanksi, ini mekanisme kontrol yang menyebabkan kerelaan dengan norma dan tujuan di masyarakat. Mereka memberi-kepuasan (hadiah) atau mencabut kepuasan (hukuman). (e). Rangking sosial, kedudukan relatif anggota kolektif yang merasa sebagai anggota. Ini akibat dari penilaian semua di masyarakat mengikuti statusnya dalam masyarakat, pelaksanaan status-peran, prestise dan penghargaan, kekuasaan, dan nilai dan sistem nilai. (f). fasilitas, berbagai hal yang digunakan dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Fasilitas ini mungkin finansial, fisik, sumber daya manusia dan sosial, kemampuan hubungan manusia, pengetahuan, teknologi dan sumber daya lain yang ada. (g). Kekuasaan, kecakapan atau kemampuan mengendalikan tingkah laku atau sikap yang lain. Kekuasaan memiliki dua sifat: 1). wibawa/wewenang yaitu hak untuk mengontrol bagi yang lain sanksi dalam masyarakat dan 2). pengaruh, yaitu aspek tidak berwenang dari kekuasaan yang dapat mengakibatkan perubahan sikap atau tingkah laku yang lain. Pengaruh dapat menjadi dasar hubungan manusia atau modal sosial lewat kemurahan pengetahuan superior, beberapa tipe dari kekayaan atau pemerasan sama sekali. (h). Kepercayaan (pengetahuan), persepsi individu dalam hubungan yang ada antara fenomena dalam dunia. Individu-individu dalam masyarakat selalu merasa hubungan-hubungan ada kesamaannya. (h). Perasaan / sentimen, perasaan normatif yang ekspresif dan mewakili perasaan individu tentang fenomena dalam dunia. Ini relatif terbuka untuk mempercayai. (i). Kepercayaan memperlihatkan 'apa yang kita tahu' sentimen memperlihatkan 'apa yang kita rasakan' tentang dunia.

Dilanjut oleh freeman dalam gudono(Syaiful et al., 2021) stakeholders di artikan sebuah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh upaya organisasi dalam dalam merealisasikan tujuannya (*any group or individual that can affect or be affected by realization of a firm's objective*).

Berdasarkan deskripsi diatas, diperlukan upaya kerja kolektif kolegal, kesadaran bersama serta partisipatif. Karena terciptanya desa maju harus di mulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri dan dikolaborasikan dengan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sehingga terjalin harmonisasi komunikasi interaktif guna menunjang tujuan pembangunan nasional (desa adalah lumbung perekonomian bangsa).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan" sangat bermanfaat bagi Masyarakat pesisir Desa Branta Pesisir. Hal ini bisa menjadi alternatif untuk bahan pengetahuan bagaimana masyarakat dalam menghadapi suasana dalam,

tanpa mengganggu terhadap semua sektor demi kelancaran dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan Negara. Karena lumbung kekuatan pembangunan nasional bertumpu pada pembangunan desa dengan terciptanya Desa mandiri dan maju. Dengan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir ini diharapkan Sebagai bahan masukan bagi para pemimpin pemerintahan agar mengoptimalkan peran serta semua komponen masyarakat dalam rangka keberhasilan program *Sustainable Development Goal* (SDGs).

Referensi

- Dwi, R., & Kartika, A. (2021). *MANAJEMEN PEMBERDAYAAN GURU DI RA ASMAUL HUSNA PURBAYAN BAKI SUKOHARJO*. 19(4), 293–301.
- Hakim, A. (2009). *Dinamika Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Pendekatan Konvensional dan Nilai-Nilai Islami)* (Issue 9).
- Maghfiroh, S. (2015). Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 94–116.
- Muzaifa, M., Nilda, C., & Irfan, I. (2022). Pendampingan Usaha Mikro Pengolahan Kue Di Desa Langapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 17–24. <https://doi.org/10.32815/jpm.v3i1.782>
- Rafael, U. G., Posumah, J. H., & Plangiten, N. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa. Di Desa Guaan Kecamatan Moat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50), 1–8.
- Rahmiyati, S. (2018). KONSEP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Sri Rakhmiyati. *Inject*, 3(2), 231–252.
- Saefulloh, A., Zulkarnaen, F., & Sadiyah, D. (2019). *Manajemen sumber daya manusia (msdm) pondok pesantren*. 4(September), 403–422. <https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Syaiful, Rachmatullah, S., Widjajanti, S., Rudiyanto, M., & Kasanova, R. (2021). Stik Kelor: Inovasi Produk Olahan Daun Kelor Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pinang Masak*, 2(2), 72–80.
- Syarief, F., Kurniawan, A., Fitriani, Jahri, M., Siregar, E., Nugroho, H., & Rimayanti. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.